Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025), pp. 170 -183
ISSN:2775-6513

DARI KINERJA FINANSIAL KE PERTUMBUHAN ➔ FENOMENA FLYPAPER EFFECT DI SULAWESI SELATAN

Sri Reski [1], Nirmala Sari[2], Astrid Safitri Ramadhani[3]
Email: astridsafitri246@gmail.com

[1,2,3] **Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

ABSTRACT

This study aims to analyze the flypaper effect phenomenon in district/city governments in South Sulawesi Province using a mapping approach of the Financial Capability Index (CCI) and economic growth. The flypaper effect is a condition where regional spending is more influenced by transfer funds from the central government, specifically the General Allocation Fund (DAU), than by Regional Original Revenue (PAD). This study uses panel data from 24 districts/cities for the 2019–2023 period. The analytical method used was panel data regression with the Chow and Hausman tests to determine the best model, and quadrant mapping based on the CCI and economic growth to identify the characteristics of the flypaper effect in each region. The results show that the DAU has a positive and significant effect on regional spending, while the influence of PAD varies across quadrants. This finding indicates a more dominant flypaper effect in regions with low fiscal capacity. The mapping also reveals that local governments' fiscal responses to transfer funds vary depending on their level of financial capacity and economic growth. This research has important implications for formulating more efficient local fiscal policies oriented toward strengthening fiscal independence.

Keywords: *Flypaper Effect, General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD), Regional Expenditure, Financial Capability Index, Economic Growth*

ARTICLE INFO

Received 02/11/2025
Accepted 09/12/2025
Online 16/12/ 2025

*Correspondence:
Astrid Safitri Ramadhani
E-mail:
astridsafitri246@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan pertumbuhan ekonomi. Flypaper effect merupakan kondisi ketika belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini menggunakan data panel dari 24 kabupaten/kota selama periode 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan uji Chow dan Hausman untuk menentukan model terbaik, serta pemetaan kuadran berdasarkan IKK dan pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi karakteristik flypaper effect di masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pengaruh PAD bervariasi antar kuadran. Temuan ini mengindikasikan adanya flypaper effect yang lebih dominan pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Pemetaan juga mengungkapkan bahwa respons fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer berbeda-beda tergantung pada tingkat kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal.

Kata Kunci: Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Indeks Kemampuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, yang pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan negara. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan reformasi politik dan sosial setelah tahun 1998, ketika masyarakat menginginkan pembangunan yang lebih merata, demokrasi lokal yang lebih kuat, dan pengurangan kendali pemerintah pusat atas urusan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Indonesia memasuki fase baru dalam kehidupan nasional, di mana daerah memperoleh kebebasan yang lebih besar untuk mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri.

Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa implementasi otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari penerapan sistem desentralisasi. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan landasan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menunjukkan distribusi kewenangan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih mendekati masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah pusat mempertahankan fungsinya sebagai pengawas dan penjaga keutuhan bangsa, sambil mendelegasikan wewenang yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam batasan sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, implementasi pemerintahan daerah bukanlah entitas yang mandiri, melainkan komponen esensial dari kerangka ketatanegaraan nasional secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa desentralisasi tidak berujung pada disintegrasi, tetapi justru memperkokoh solidaritas sosial dan politik di tingkat nasional.

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menegaskaan bahwa skema pendanaan dirancang dalam bingkai NKRI dengan prinsip proporsional, adil, demokratis, dan transpaaran. Sistem ini mempertimbangkan karakteristik serta kapasitas tiap daerah, sekaligus mentapkan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik (Sukri et al., 2003).

Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi fiskal berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Kebijakan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga diharapkan mampu mendorong efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal.

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 03 Desember (2025). pp. 170 -183

Tabel 1.1 Realisasi Dana Perimbangaan Kab/Kota di Indonesia Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah)

TAHUN	DAK	DAU	DBH
2019	69.326,70	421.340,60	116.863,20
2020	53.787,35	384.381,52	94.400,70
2021	63.648,20	377.791,39	117.320,90
2022	60.874,00	378.000,00	215.156,91
2023	53.422,46	398.162,04	199.030,34

Sumber : DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan data di atas, Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dalam struktur Dana Perimbangan, dengan kisaran alokasi antara Rp370 miliar hingga Rp421 miliar bagi pemerintah kabupaten/kota. Optimalisasi pengelolaan DAU secara tepat dan efisien berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendanaan sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah, tercermin dari dominasi pembiayaan melalui transfer fiskal dari pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah cenderung mempertahankan besaran alokasi DAU pada periode berikutnya, sehingga tujuan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya produktif belum sepenuhnya tercapai.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah dan Pendapata Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2024 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2011	18.801,92	3.026,43
2012	21.375,92	3.581,26
2013	24.472,07	4.364,41
2014	28.078,90	5.685,64
2015	33.586,35	6.202,95
2016	38.848,46	6.981,02
2017	40.456,35	8.354,95
2018	41,656,24	8.168,16
2019	42.962,09	8.774,01
2020	42.320,19	8.381,14
2021	42.156,81	8.812,95
2022	42.874,97	9.759,91
2023	44.267,18	10.583,88

Tabel 1.2 menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan sepanjang periode 2011–2024. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp18,8 miliar menjadi Rp44,2 miliar, meskipun pada 2024 mengalami penurunan menjadi Rp40,9 miliar. Sementara itu, PAD tumbuh relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 11,2%, namun kontribusinya terhadap

total belanja hanya berkisar 14–25%. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), serta mengindikasikan adanya fenomena flypaper effect, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD yang diperoleh secara mandiri.

Dari data Tabel 1.2 dinamika belanja daerah setelah tahun 2020 memperkuat dugaan peneliti, meskipun PAD tumbuh 16,4% pada 2020-2022 namun belanja daerah stagnan kisaran RP42-43 milyar lalu melonjak 8,5% pada tahun 2023. Studi sebelumnya di Sulawesi (Armawaddin, 2015; Anam et al.,2022) telah mengidentifikasi flypaper effect pada DAU dan DAK, khususnya di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Namun, penelitian terbatas pada analisis temporal tanpa mempertimbangkan dimensi spasial kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, disparitas antardaerah di Sulawesi Selatan sangat mencolok seperti PAD Kab.Maros tumbuh 18% (2021-2023) sementara Kab.Pangkep hanya 5% yang berpotensi menciptakan variasi respons belanja terhadap transfer pusat.

Belanja daerah mengacu pada total pengeluaran riil yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang meliputi belanja operasional, belanja modal, serta belanja tak terduga, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Informasi mengenai realisasi belanja dari setiap pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2019 hingga 2023 disajikan dalam satuan miliar rupiah (Rp).

Pendapataan Asli Daerah merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Data realisasi pendapatan yang berhasil dihimpun oleh setiap pemerintah daerah dari total 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2019 hingga 2023 disajikan dalam satuan miliar rupiah (Rp).

Dana Alokasi Umum Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan utama untuk mendorong pemerataan kapasitas fiskal antardaerah. Dana ini digunakan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Informasi terkait realisasi DAU yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023 disajikan dalam satuan miliar rupiah (Rp).

Pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2012) didefinisikan sebagai "proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang berlangsung terus-menerus dan disertai dengan perbaikan dalam struktur ekonomi suatu negara." Studiini menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan tahun 201sebagai proksi untuk menggambarkan kondisi ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023, yang

selanjutnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Flypaper Effect merupakan Fenomena yang terjadi dalam keuangan daerah menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi

Umum (DAU), yang diterima oleh pemerintah daerah cenderung langsung dialokasikan untuk meningkatkan belanja daerah. Artinya, alih-alih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana tersebut lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga melekat erat pada struktur belanja pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sementaraa itu, variabel investasi daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel pertumbuhan ekonomi terbukti hanya berperan sebagai moderator dalam hubungan antara DAU dan belanja daerah, namun tidak memberikan pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan PAD, DBH, investasi daerah, maupun DAK dengan belanja daerah (Ginting et al., 2024).

Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang keuangan daerah, terkait dengan strategi untuk mengurangi beban pembiayaan yang berlebihan sebagai akibat dari terjadinya Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi informasi yang bernilai, khususnya di ranah keuangan daerah, dengan menyoroti strategi-strategi yang dapat diterapkan guna menekan beban pembiayaan yang berlebihan akibat fenomena Flypaper Effect.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang menurut (Musgrave & Musgrave (1959) desentralisaasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan fungsi dan alokasi sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sejalan dengan itu, Oates (1999) melalui Teori Fiscal Federalism menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kedekatan dan pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat, sehingga implementasi desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang responsif, tepat guna, dan efisien.

Menurut Afiah (2009) Pengeluaran pemerintah mencakup semua bentuk belanja yang dikeluarkan melalui kas umum daerah yang berdampak pada penurunan ekuitas dana, merupakan kewajiban fiskal pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, dan tidak menghasilkan pemasukan kembali bagi daerah. Belanja daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu, serta belanja tidak langsung yang meskipun tidak berhubungan langsung dengan program, tetap mendukung fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam kajian

makroekonomi, perkembangan belanja pemerintah daerah telah banyak dijelaskan melalui beberapa teori ekonomi klasik, yaitu Teori Pembangunan tentang Pengeluaran Pemerintah, Hukum Wagner, serta Teori Peacock dan Wiseman.

Pada tahap awal, pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional cenderung tinggi, sebab negara perlu melakukan investasi besarbesaran untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah, aktivitas investasi dari sektor swasta mulai tumbuh signifikan.

Sementara pada tahap lanjut, Rostow mengemukakan bahwa peran belanja pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke pembiayaan program sosial seperti jaminan sosial, dana pensiun, pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya (Zulfirmansyah, 2002). Di sisi lain, Musgrave menambahkan bahwa seiring dengan proses pembangunan, proporsi investasi swasta terhadap Produk Nasional Bruto (GNP) akan meningkat, sedangkan proporsi investasi pemerintah terhadap GNP akan menurun. Pada fase inipula, tingkat pendapatan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan naiknya permintaan terhadap barang konsumsi pribadi seperti kendaraan bermotor (Nahumuri, 2019).

Teori yang dikenal sebagai Hukum Wagner dikemukakan oleh Adolf Wagner, seorang ekonom asal Jerman. Berdasarkan hasil penelitiannya, Wagner menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat secara terus-menerus, salah satunya karena peran pemerintah dalam mengatur berbagai aktivitas sosial dalam masyarakat semakin kompleks (Idris, 2018). Di negara-negara maju, kegagalan pasar dalam satu sektor industri dapat dengan cepat berdampak negatif terhadap sektor lainnya yang saling berkaitan (Wardhani & Gulo, 2017). Lebih lanjut, peningkatan belanja pemerintah juga dipicu oleh berbagai faktor lainnya seperti urbanisasi, pertumbuhan pendapatan masyarakat, peningkatan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan nasional, berkembangnya sistem demokrasi, dan meningkatnya permintaan publik terhadap layanan pemerintah, serta adanya ketidakefisienan dalam birokrasi pemerintahan (Dumairy,1996 dalam kutipan (Unikom, n.d.).

Teori yang dikembangkan oleh Peacock dan Wiseman menjelaskan tentang dinamika pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat terus-menerus atau continuous growth, melainkan mengalami peningkatan secara bertahap seperti pola tangga (step-like), mirip dengan pola pengeluaran rumah tangga. Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pada titik tertentu, masyarakat memiliki ambang batas toleransi terhadap tarif pajak. Artinya, meskipun tarif pajak yang ditetapkan cukup tinggi, selama berada dalam batas toleransi tersebut, masyarakat masih bersedia membayarnya. Akan tetapi, jika beban pajak melampaui ambang batas yang dianggap wajar oleh masyarakat, maka bisa timbul penolakan atau keengganan dalam memenuhi kewajiban pajak (Nahumuri, 2019).

Adam Smith, tokoh utama aliran ekonomi klasik, dikenal melalui karya terkenalnya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Dalam pandangannya, ia menentang keterlibatan pemerintah secara langsung dalam aktivitas industri dan perdagangan, dan merupakan pendukung kuat dari prinsip perdagangan bebas (Jhingan et al., 2007).

Teori pertumbuhan Neoklasik bertujuan untuk menjelaskan determinan utama pertumbuhan ekonomi dan kontribusi relatif masingmasing faktor terhadap pencapaian pertumbuhan tersebut. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa ada tiga komponen utama yang menentukan tingkat aktivitas ekonomi, yaitu modal fisik, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja. Ketiganya berperan secara kolektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi,dengan penekanan khusus pada bagaimana investasi modal dan inovasi teknologi dapat meningkatkan output dalam jangka panjang (Sukirno & Siengthai, 2011). Teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar menyoroti peran sentral investasi sebagai motor penggerak utama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Investasi berfungsi ganda, yakni sebagai pemicu terbentuknya pendapatan serta sebagai sarana untuk memperluas kapasitas produksi melalui peningkatan akumulasi modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai apabila terdapat investasi yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan pendapatan riil secara terus menerus guna memastikan bahwa kapasitas produksi tambahan yang dihasilkan dari investasi tersebut dapat digunakan secara penuh (Agustianto, 2012 dalam Jhingan et al., 2007).

Teori konvergensi ekonomi regional yang dikembangkan oleh Barro dan Sala-i-Martin menjadi pijakan teoretis penting dalam menganalisis pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap pemerataan pembangunan antardaerah. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah sigma convergence, yang mengukur penurunan disparitas pendapatan regional melalui standar deviasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Flypaper Effect merupakan suatu fenomena dalam kebijakan fiskal daerah yang menggambarkan kondisi ketika dana transfer dari pemerintah pusat cenderung langsung digunakan untuk meningkatkan belanja pemerintah daerah, alih-alih menggantikan atau mengurangi ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Istilah ini berakar dari analogi yang dikemukakan oleh Arthur Okun pada tahun 1930, yaitu "money sticks where it hits", yang mengilustrasikan bahwa dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat "melekat" pada anggaran belanja, bukannya dialihkan atau digunakan secara lebih efisien (Kusumadewi & Rahman, 2007).

Berdasarkan penjabaran tersebut, model hubungan dalam penelitian ini dibangun atas dua landasan utama: pertama, prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemandirian keuangan melalui optimalisasi PAD; dan kedua, potensi terjadinya Flypaper Effect yang ditunjukkan melalui dominasi peran dana transfer pusat dalam memengaruhi perilaku belanja pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini turut menyajikan gambaran mengenai praktik pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran di Provinsi Sulawesi Selatan.

DATA DAN METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori, yang bertujuan menganalisis korelasi kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari laporan statistik tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, berupa data panel yang menggabungkan data runtut waktu (2019–2023) dan data silang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, arsip, serta sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif melalui sejumlah pengujian dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y=\beta0+\beta1X1+\beta2X2+e$$

Keterangan:

Y= Belanja Daerah
X1= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2= Dana Alokasi Umum (DAU)
β0= Konstanta (Nilai variabel dependen Y ketika tidak mengalami perubahan)
e= Standar Error (Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian).

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekaatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan populasi dan sampel sebanyak 24 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup periode waktu dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk menganalisis data, digunakan model regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews sebagai alat bantu analisis statistik. Di samping itu, analisis kuadran yang melibatkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat bantu analisis tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, distribusi DAU pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tren alokasi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kota Makassar secara konsisten menerima alokasi DAU tertinggi dibandingkan daerah lain, diikuti oleh Kabupaten Bone dan Gowa. Beberapa daerah seperti Bone dan Wajo tercatat mengalami peningkatan nominal yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang kemungkinan mencerminkan pertumbuhan kebutuhan fiskal maupun penyesuaian alokasi berdasarkan formula pemerintah pusat. Di sisi lain, alokasi DAU pada daerah seperti Kota Parepare dan Kabupaten Bantaeng cenderung lebih rendah dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat. Secara umum, tren alokasi ini memperlihatkan peran strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas dan kesetaraan fiskal antardaerah, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi.

UJI HIPOTESIS

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasivariabel terikat dalam model yang digunakan. Nilai R^2 memberika gambaran mengenai tingkat kecocokan model regresi terhadap data yang diamat. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk masing-masing kuadran disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Kuadran	R-Square
Kuadran 1	0.959856
Kuadran 2	0.505089
Kuadran 3	0.450722
Kuadran 4	0.976111

Merujuk pada Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa pada Kuadran 1, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,959856 menunjukkan bahwa sekitar 95,99% variasi dari variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Hal ini mencerminkan bahwa model yang digunakan mempunyai tingkat kemampuan prediktif yang besar.

Untuk Kuadran 2, nilai R^2 yang diperoleh adalah 0,505089 menunjukkan bahwa 50,51% variasi pada variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya 49,49% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Ini mencerminkan kemampuan prediktif model yang tergolong sedang.

Pada Kuadran 3, nilai R^2 sebesar 0,450722 menunjukkan bahwa hanya 45,07% variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen dalam model, yang menandakan bahwa daya jelas model masih terbatas. Dengan demikian, dimungkinkan adanya faktor lain yang turut berperan namun belum dimasukkan dalam model estimasi.

Adapun pada Kuadran 4, nilai R^2 tertinggi tercatat sebesar 0,976111. Ini berarti bahwa sekitar 97,61% variasi dalam variabel terikat berhasil dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, yang mengindikasikan kemampuan prediktif yang sangat kuat, bahkan hampir mendekati sempurna.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Ghozali (2018) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik pula kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Nasution (2018) bahwa nilai R^2 yang melebihi 0,75 menggambarkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat tinggi terhadap variabel dependen yang diteliti.

Tabel 4.5 Hasil Uji F

Kuadran	**Prob (F-statistic)**
Kuadran1	0.000000
Kuadran 2	0.000000
Kuadran 3	0.122821
Kuadran 4	0.000000

Sumber : Hasil olah data dengan Eviews 12, 2025

Probabilitas dari F-statistic digunakan sebagai dasar untuk menilai signifikansi keseluruhan model regresi. Jika nilai probabilitas tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, maka model regresi dianggap signifikan secara statistik, yang berarti bahwa seluruh variabel independen secara simultan berkontribusi terhadap perubahan variabel dependen.

Pada Kuadran 1, 2, dan 4, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000, yang berada jauh di bawah ambang signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga model regresi dalam kuadran tersebut signifikan secara simultan. Dengan demikian, variabelvariabel independen yang digunakan dalam masing-masing model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap belanja daerah.

Sebaliknya, untuk Kuadran 3, nilai Prob (F-statistic) tercatat sebesar 0.122821melebihi tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi pada Kuadran 3 tidak signifikan secara simultan. Dalam artian, variabel-variabel bebas yang digunakan tidak memiliki pengaruh kolektif yang signifikan terhadap variabel terikat dalam wilayah-wilayah yang berada di kuadran ini.

Uji t

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Kuadran	Prob	
	PAD	DAU
Kuadran 1	0.0236	0.0465
Kuadran 2	0.0000	0.0397
Kuadran 3	0.9851	0.1985
Kuadran 4	0.0028	0.8061

Sumber : Hasil olah data dengan Eviews 12

Jika nilai probabilitas < 0.05, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.
Kuadran 1 : PAD (0.0236) dan DAU (0.0465) < 0.05 Keduanya memiliki pengaruh signifikan.
Kuadran 2 : PAD (0.0000) dan DAU (0.0397) < 0.05 Keduanya juga berpengaruh signifikan secara parsial.
Kuadran 3 PAD (0.9851) dan DAU (0.1985) > 0.05 → Tidak ada variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Kuadran 4 PAD (0.0028) < 0.05 → Berpengaruh signifikan DAU (0.8061) > 0.05 → Tidak berpengaruh signifikan.

Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa dalam kuadran tersebut, belanja daerah lebih didorong oleh kontribusi PAD, dan tidak ditemukan indikasi terjadinya Flypaper Effect. Dengan kata lain, meskipun tingkat kapasitas fiskal masih tergolong rendah, pemerintah daerah mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi untuk meningkatkan PAD, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pokok dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang kuat memiliki

peran penting guna mendorong peningkatan PAD serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, studi ini mengungkapkan bahwa fenomena Flypaper Effect dapat terjadi pada berbagai jenis wilayah baik daerah dengan kondisi fiskal dan ekonomi yang baik maupun pada daerah dengan keterbatasan. Hal ini mengindikasikan bahwa Flypaper Effect bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kapasitas fiskal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan perilaku fiskal pemerintah daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa baik daerah yang tergolong maju maupun yang masih tertinggal memiliki kecenderungan untuk lebih mengandalkan DAU dalam membiayai pengeluaran, daripada berupaya memaksimalkan PAD. Pada daerah yang telah berkembang, kecenderungan ini kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya efisiensi fiskal, sementara pada daerah tertinggal, hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketergantungan struktural terhadap transfer pusat. Hal ini sejalan dengan studi oleh Kurnia & Ananda (2013) yang menyimpulkan bahwa Flypaper Effect tidak hanya terjadi di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, tetapi juga dapat muncul pada wilayah dengan kapasitas fiskal tinggi apabila pengelolaan keuangan daerah tidak diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tulang utama dalam desentralisasi fiskal yang menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Secara teori, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pembangunan ekonomi. pula kapasitas fiskal daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran daerah tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Musgrave & Musgrave, 1959);(Oates, 1999). Dalam konteks penelitian ini, PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal lokal secara langsung mampu mendorong peningkatan anggaran belanja untuk pelayanan publik, infrastruktur, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Gunakan literatur yang benar-benar dapat mendukung pengungkapan latar belakang yang diungkapkan. Pengantar bab harus memuat latar belakang dan tujuan penelitian. Tidak menggunakan *numbering ataupun bulleting*, semua poin-poin dalam pendahuluan harus disajikan dalam bentuk narasi.

Penelitian oleh Nurlina & Fajar (2022) menyimpulkan bahwa PAD secara positif dan signifikan mempengaruhi belanja daerah, namun efeknya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan efektivitas pengelolaan fiskal. Studi oleh Dahlia (2022) di Kota Makassar juga menunjukkan hubungan serupa, tetapi menyoroti bahwa PAD cenderung lebih lambat meningkat dibandingkan kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian, meskipun secara teori PAD menjadi indikator kemandirian fiskal, dalam praktiknya masih banyak daerah yang belum mampu menggali potensi PAD secara maksimal karena berbagai kendala administratif, regulatif, dan politik.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Secara teoritis, DAU seharusnya bersifat stimulan, yaitu mendorong belanja daerah dalam jangka pendek sambil menumbuhkan kapasitas fiskal daerah untuk mandiri dalam jangka panjang. Namun, hasil studi ini membuktikan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanja daerah di sebagian besar kuadran, terutama pada Kuadran I dan III. Ini merupakan indikasi kuat terjadinya dana

transfer dibandingkan PAD. Flypaper Effect, yaitu kondisi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD.

Fenomena ini sangat relevan dengan teori Oates (1999) dan model bureaucratic behavior oleh Niskanen (1968), hal ini menunjukkan kecenderungan birokrat daerah yang lebih memilih memanfaatkan dana transfer daripada mendorong peningkatan PAD, karena dianggap sebagai opsi yang lebih praktis dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Fachruzzaman et al., (2021) dan Fadilah & Helmayunita (2020) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum cenderung langsung terserap ke dalami struktur belanja pemerintah daerah dan menciptakan pola ketergantungan fiskal yang bersifat struktural.

Dengan demikian hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa DAU berperan besar dalam pembentukan anggaran belanja, namun efeknya cenderung menciptakan ketergantungan, terutama pada wilayah yang belum mempunyai kemampuan fiskal yang besar. Sifat DAU yang tidak bersyarat memungkinkan pemerintah daerah menggunakan dana tersebut tanpa insentif untuk menggali pendapatan lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem transfer fiskal yang berbasis kinerja (performance-based transfer), agar DAU bisa benar-benar berfungsi sebagai katalisator pembangunan, bukan menjadi penopang permanen.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil analisis data panel dan pemetaan kuadran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) serta Pertumbuhan Ekonomi pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi berhasil menjelaskan variasi terjadinya Flypaper Effect. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa fenomena Flypaper Effect tidak terjadi merata, melainkan bervariasi tergantung posisi fiskal dan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa karakteristik fiskal dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah memengaruhi sejauh mana transfer pusat berdampak terhadap perilaku belanja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada sebagian besar kuadran, khususnya Kuadran IV yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun IKK rendah, PAD terbukti menjadi penentu utama belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu memaksimalkan potensi PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Temuan ini mendukung pentingnya optimalisasi PAD dalam membangun kemandirian fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Hasil uji pada Kuadran I dan III menunjukkan bahwa koefisien DAU lebih tinggi dibandingkan PAD, sehingga belanja daerah cenderung lebih dipengaruhi oleh transfer pusat daripada usaha penggalian pendapatan sendiri. Situasi tersebut mencerminkan pola ketergantungan fiskal yang sesuai dengan karakteristik fenomena Flypaper Effect.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Flypaper Effect masih menjadi tantangan fiskal di Sulawesi Selatan, terutama bagi daerah yang belum optimal dalam

menggali PAD. Oleh karena itu, diperlukan strategi fiskal yang bukan hanya terfokus pada penerimaan, melainkan juga memperkuat tata kelola dan efisiensi belanja untuk meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, L. (2009). *Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Jam Kerja, Modal Usaha, dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Berskala Kecil (Studi Empiris di Pasar Beringharjo Yogyakarta)*.

Fachruzzaman, F., Suranta, E., & Martini, E. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Fairness*, *5*(3), 123–138. https://doi.org/10.33369/fairness.v5i3.15310

Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(3), 3144–3159.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting, A., Maksum, A., & T. (2024). The Influence Of Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Investment, Special Allocation Fund On Regional Expenditure With Economic Growth As A Moderating Variable In Districts/Cities In North Sumatra Province During The Period. *International Journal of Research and Review*, *11*(4), 302–317. https://doi.org/10.52403/IJRR.20240434

Idris, M. (2018). The Impact of Education and Training, Work Discipline and Organizational Culture on Employee's Performance: The Study of Disaster Management and Fire Department in Palembang City, Indonesia. *International Journal of Human Resource Studies*, *8*(3), 118.

Januari, N. (2024). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. *3*(1), 514–530.

Jhingan, A., Lee, J. S., & Kumarasinghe, S. P. (2007). Lichen Amyloidosis in an Unusual Location. *Singapore Medical Journal*, *48*(6), E165--E167.

Kurnia, E. D., & Ananda, C. F. (2013). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, *1*.

Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *11*(1).

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy* (Vol. 658). McGraw-Hill.

Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *4*(1), 1–12.

Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, *8*(2), 15–25.

Nurlina, & Fajar, I. (2022). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *6*(2), 112–121. https://doi.org/10.33059/jse.v6i02.5976

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, *37*(3), 1120–1149.

Sukirno, D. S., & Siengthai, S. (2011). Does Participative Decision Making Affect Lecturer Performance in Higher Education? *International Journal of Educational Management*, *25*(5), 494–508.

Sukri, N. C., Laras, K., Wandra, T., Didi, S., Larasati, R. P., Rachdyatmaka, J. R., Osok, S., Tjia, P., Saragih, J. M., & Hartati, S. (2003). Transmission of epidemic dengue hemorrhagic fever in easternmost Indonesia. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, *68*(5), 529–535.

Unikom, I. H. I. (n.d.). *Ilmu Hubungan Internasional: Sistem Ekonomi Indonesia*.

Wardhani, D. T., & Gulo, Y. (2017). Pengaruh Iklim Organisasi, Kepemimpinan Transformasional dan Self Efficacy terhadap Perilaku Kerja Inovatif. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *19*(3), 212–217.

Zulfirmansyah, M. (2002). *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1973--1997 (Analisis Kausalitas dengan Uji Model Koreksi Kesalahan)*.